

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menjadi anggota calon legislatif berkualitas adalah impian semua pihak dan merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi kalau mau penyelenggaraan pemerintahan oleh eksekutif bisa dikendalikan dengan baik. Oleh karena itu, perlu dilakukan seleksi cukup ketat terhadap calon legislatif. Sampai saat ini belum ada “formula baku” yang bisa digunakan untuk memilih calon legislatif. Umumnya persyaratannya adalah ditentukan tidak dapat digunakan sebagai indikator untuk mengukur kapasitas legislatif. Untuk itu, Anda perlu memikirkannya pola rekrutmen calon melalui pendidikan non formal seperti “sekolah calon legislatif” dengan materi pelajaran dirancang khusus untuk calon legislatif.

Calon legislatif adalah seseorang yang nantinya akan bertindak untuk mewakili partainya di lembaga legislatif yang dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Untuk menjadi calon legislatif, seseorang harus melalui proses rekrutmen calon legislatif yang telah ditetapkan oleh partai politik. Calon legislatif adalah contoh kader partai dan DPR/DPRD yang akan menjadi aset penting dalam pemulihan dan pemulihan kepercayaan masyarakat partai politik dan parlemen. Kemampuan dan kepekaan partai politik untuk merespon selama ini dimana dan bagaimana aspirasi masyarakat terhadap calon legislatif menjadi hal yang terpenting dan menjadi syarat dalam pemilihan calon legislatif. Minat dan aspirasi masyarakat harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam proses pemilihan dan penawaran calon legislatif. (Ilmu et al., 2014).

Pencalonan legislatif oleh partai politik umumnya meliputi tiga tahapan penting: pertama, pemilihan calon; kedua, penyaringan dan pemilihan calon yang telah disaring; dan ketiga, penetapan calon beserta nomor urutnya. Namun, secara umum tahapan penyaringan calon legislatif meliputi interaksi elit partai di tingkat desa/kelurahan atau cabang partai dengan elit partai di tingkat Kecamatan atau cabang. Penapisan dan seleksi meliputi interaksi elit partai di tingkat Kecamatan dan elit partai di tingkat Kabupaten/Kota atau cabang/daerah, sedangkan tahapan penentuan calon legislatif dan nomor urut meliputi interaksi antara elit partai di tingkat Kabupaten, terutama pengurus partai sehari-hari di tingkat Kabupaten/Kota dengan tim kecil yang dibentuk dan diberi wewenang untuk menentukan calon legislatif.

Pencalonan legislatif merupakan salah satu proses dan tahapan penting dalam pemilu. Melalui proses pencalonan secara teoritis mempertemukan kepentingan partai politik di satu sisi, dengan aspirasi dan kepentingan rakyat di sisi lain. Oleh karena itu, calon legislatif pada hakikatnya adalah “wakil rakyat” yang memiliki amanah untuk memperjuangkan kepentingan pemilihnya di lembaga legislatif. Namun dalam praktek pemilu di Indonesia, rakyat memilih sebagai subjek dalam proses politik dan partai-partai yang diwakili oleh partai-partai di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tingkat nasional dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di tingkat daerah seringkali tidak merasa aspirasi dan kepentingannya terwakili oleh anggota parlemen.

Setiap calon legislatif dapat terpilih jika memperoleh suara terbanyak dan memenuhi persyaratan pemilihan umum. Terlepas dari nomor urutnya, sehingga menjadi peluang bagi pemilih untuk memilih kandidat yang mereka inginkan.

Publik diberikan kebebasan untuk berperan aktif dan menjadi bagian dari proses demokrasi. Di sisi lain, partai politik masih sangat lamban menjalankan tugasnya, yang seharusnya dapat dilakukan oleh partai politik menciptakan ruang yang baik dan menciptakan regenerasi yang sehat. Awalnya partai politik diharuskan untuk memutuskan atau membuat atasan atau kader terbaik yang akan memimpin, tapi terus nyatanya saat ini partai politik hanya dijadikan alat kendaraan politik hanya karena kebijakan publik berubah fungsinya menjadi kebijakan kelompok tertentu untuk kesejahteraan segelintir orang. Padahal dalam dalam konteks demokrasi yang ideal, partai politik adalah institusi yang memiliki pengaruh terbesar dalam menyaring kader terbaik untuk kursi pemerintahan.

Sebagai calon anggota DPR/DPRD dengan itikad baik untuk menjadi wakil rakyat saja tidak cukup sedangkan yang sangat penting adalah kebutuhan intelektualitas dan integritas dalam pemahaman yang baik tentang negara serta mengenai tujuan utamanya yaitu untuk kemaslahatan seluruh rakyat. Sangat penting untuk menghasilkan politisi atau politikus yang berbudaya memiliki martabat, harga diri, dan cara berpikir yang jelas. Karena sistem kader di internal partai politik sangat rendah serta munculnya kepentingan individu untuk setiap calon legislatif dan lebih buruk lagi, calon legislatif tidak ragu-ragu untuk menghancurkan para pesaingnya baik dari partai yang berbeda maupun dari partai yang sama. Konflik semacam itu dapat menyebabkan perpecahan di dalam partai. Selain itu, karena masing-masing kandidat berjuang untuk dirinya sendiri, tidak dapat dipungkiri bahwa dia menemukan banyak penipuan, khususnya penipuan mengenai politik uang (money politic) (Kuddus, 2019).

Negara yang menggunakan sistem demokrasi setiap warga Negara berhak mengeluarkan pendapatnya dan dilindungi oleh Undang-undang. Salah satu cara masyarakat menyampaikan aspirasi atau pendapatnya adalah melalui partai politik. Hal ini merupakan hal yang wajib dalam Negara yang menganut sistem Demokrasi dan setiap elemen Negara wajib menaati dan menjalankannya. Idealnya sistem pemilihan partai harus demikian mempertimbangkan calon anggota legislatif yang bergabung sebagai anggota pertimbangan kader dan calon keaktifan dalam partai politik selama beberapa tahun. Faktor aktif partai politik dengan tujuan demikian anggota partai dapat diberikan pendidikan politik melalui internal partai politik dengan metode pelatihan, workshop dan seminar secara rutin. Pengetahuan kader partai politik sangat menentukan kualitas kandidat dalam mengelola politik dengan cara bijaksana dengan pendekatan normatif diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Partai politik merupakan sarana bagi warga Negara untuk berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan Negara. Kehadiran partai politik dalam membantu proses penyelenggaraan Negara memiliki cerita yang luar biasa panjang, walaupun bisa dikatakan bahwa partai politik merupakan wadah baru dalam dunia politik, masyarakatnya jauh lebih muda dari Negara itu sendiri.

Calon legislatif yang diusung Partai Darul Aceh dari pemilu sebelumnya terdiri dari figur-figur yang mampu memberikan yang terbaik bagi partai dalam meningkatkan elektabilitas Partai Darul Aceh. Partai Darul Aceh memperluas jangkauan politik baik melalui non media maupun media sosial seperti mengunjungi masyarakat, mengadakan pengajian, mengunjungi dayah dan memberikan pengobatan gratis serta kegiatan yang disesuaikan dengan kondisi

masyarakat di Aceh langsung dan sebagainya. Apakah di pemilu 2024 kredibilitas calon legislatif Partai Darul Aceh di Kabupaten Aceh Besar akan sama saja seperti pemilu sebelumnya atau akan melakukan perubahan agar kredibilitas calon legislatif Partai Darul Aceh di Kabupaten Aceh Besar agar dapat memenangkan pemilu 2024.

Masalah di atas menurut asumsi penulis yaitu ingin mengetahui bagaimana kredibilitas dari calon legislatif Partai Darul Aceh pada pemilu 2024 di Kabupaten Aceh Besar, berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul “Kredibilitas Calon Legislatif Partai Darul Aceh Pada Pemilu 2024 di Kabupaten Aceh Besar”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat diidentifikasi beberapa hal, di antaranya ialah :

1. Bagaimana kredibilitas calon legislatif Partai Darul Aceh yang ada di Kabupaten Aceh Besar?

1.3 Faktor Penelitian

Adapun yang menjadi faktor dalam penelitian ini ialah ingin mengetahui bagaimana kredibilitas calon legislatif Partai Darul Aceh pada pemilu 2024 di Kabupaten Aceh Besar.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui sejauh mana kredibilitas calon legislatif Partai Darul Aceh pada pemilu 2024 di Kabupaten Aceh Besar. Semoga penelitian ini bermanfaat sebagai inspirasi bagi kredibilitas calon legislatif Partai Darul Aceh di Kabupaten Aceh Besar.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Dapat menjadi kajian baru dalam pembahasan tentang kredibilitas calon legislatif Partai Darul Aceh pada pemilu 2024 di Kabupaten Aceh Besar, dalam berpolitik bagi peneliti khususnya dan yang membaca penelitian ini pada umumnya.
- b. Dapat menambah pengetahuan ilmu politik, khususnya yang berkaitan dengan berpolitik.

2. Manfaat Praktis

- a. Dapat menjadi contoh untuk melakukan penelitian selanjutnya dengan variabel berbeda.
- b. Dapat menjadi masukan bagi pihak terkait dan semoga penelitian ini membawa manfaat bagi penelitian dan seluruh pihak yang terkait.
- c. Dapat menjadi informasi dalam membahas kredibilitas calon legislatif Partai Darul Aceh pada pemilu 2024 di Kabupaten Aceh Besar.